



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 190 TAHUN 2022
TENTANG
DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN DAN HAK AKSES
ARSIP DINAMIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Daftar Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1423);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN DAN HAK AKSES ARSIP DINAMIS KOMISI PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menetapkan Daftar Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan aturan pembatasan terkait hak akses terhadap fisik dan informasi dalam menentukan keterbukaan akses dan kerahasiaan suatu arsip dalam rangka melindungi hak dan kewajiban pencipta arsip dan pengguna arsip.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 190 TAHUN 2022
TENTANG DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN DAN
HAK AKSES ARSIP DINAMIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN DAN HAK AKSES ARSIP DINAMIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

- A. DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FUNGSI FASILITATIF
- B. DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FUNGSI SUBSTANTIF

A. DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN DAN HAK AKSES ARSIP DINAMIS FUNGSI FASILITATIF KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
KEPEGAWAIAN (SDM)						
1.	SDM.01	FORMATASI PEGAWAI				BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
		Usulan dari Unit Kerja	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan	
		Usulan Permintaan Formasi kepada MENPAN RB dan Kepala BKN	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
						kelembagaan	
		Penetapan Formasi ASN (CPNS/PPK)		Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan	
		Penetapan Formasi Khusus ASN (CPNS/PPK)		Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan	
2.	SDM.02	PENGADAAN PEGAWAI					BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
		a.	Proses Penerimaan Pegawai meliputi:	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengumuman - Pendaftaran Secara online - Seleksi Administrasi - Seleksi Kompetensi dasar dengan Metode CAT - Seleksi Kompetensi Bidang dengan Metode CAT - Integrasi Nilai SKD dan SKB 				mengganggu kinerja kelembagaan	
	b.	Pengumuman Kelulusan		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
	c.	Pemberkasan untuk peserta lulus seleksi		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
						kinerja kelembagaan	
	d.	Penetapan Penempatan CPNS/PPPK		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
	e.	Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
	f.	Penerbitan SK CPNS/PPPK		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
	g.	Nota Usul Pengangkatan PNS		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3			4	5	6	7
		Menjadi PNS					dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
	h.	Penerbitan SK PNS/PNS Kolektif			Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
	i.	PNS Pengadaan Pegawai Non PNS - Pengumuman - Seleksi Administrasi - Pelaksanaan Ujian Tertulis - Wawancara			Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
	j.	Penetapan Pengumuman Kelulusan Pegawai Non PNS			Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
						kinerja kelembagaan	
3.	SDM.03	PEMBINAAN KARIR PEGAWAI					BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
	a.	Diklat/Kursus/Tugas Belajar/Ujian Dinas/Izin Belajar Pegawai/Ujian Penyesuaian Ijazah - Surat Perintah/Surat Tugas/SK/Surat Izin - Laporan Kegiatan Pengembangan Diri		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	PUSLATLITBANG
	b.	Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)/Sertifikat		Terbatas	Perorangan dan Pejabat-pejabat yang di beri kewenangan	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
						unit	
	c.	Ujian Kompetensi - Assesment test pegawai - Pemetaan/ <i>talent mapping</i> pegawai	Terbatas	Perorangan dan Pejabat-pejabat yang di beri kewenangan	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit		
	d.	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
	e.	Daftar Usul Penetapan Angka Kredit	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
	f.	Pakta Integritas Pegawai	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
						dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
	g.	Disiplin Pegawai yang meliputi Daftar Hadir dan Rekapitulasi Daftar Hadir		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
	h.	Berkas Hukuman Disiplin Ringan, Sedang dan Berat		Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan	
	i.	Penghargaan dan Tanda Jasa		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
						kinerja kelembagaan	
	j.	Pembinaan Kepegawaian	Mental	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
4.	SDM.09	PENGADUAN/PERMASALAHAN a. Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai b. Laporan Permasalahan Kepegawaian	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	
5.	SDM.05	MUTASI PEGAWAI				BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	
	a.	Alih status, pindah instansi, pindah wilayah kerja dipekerjakan, mutasi antar	Terbatas	Eselon IV	Bila diketahui oleh pihak yang tidak berhak		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
		unit				dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan	
	b.	Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN		Terbatas	Eselon IV	Bila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan	
	c.	Mutasi Keluarga - Surat Izin Pernikahan/Perceraian		Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat menganggu	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> - Surat Penolakan Izin Pernikahan/Perceraian - Surat Nikah/Cerai - Akta Kelahiran Anak - Surat Keterangan Meninggal Dunia 				pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan	
	d.	Usul Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
	e.	Berita Acara dan serah terima jabatan		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
	f.	Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan		Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
		Struktural/Fungsional				mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan	
	g.	Usul Penetapan Perubahan Data Status/Kedudukan Pegawai - Dokumen Plh/Plt - Usul Kenaikan Gaji Berkala (KGB) - Penugasan Sementara		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
	h.	Peninjauan Masa Kerja		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
	i.	Berkas Baperjakat		Sangat	Eselon II	Merugikan	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
				Rahasia		kinerja Pemerintah/ Negara	
	j.	Pencantuman Gelar		Terbatas	Eselon IV	Bila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	
6.	SDM.06	ADMINISTRASI PEGAWAI					BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
	a.	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
	b.	Cuti Besar		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
	c.	Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kelembagaan	
	d.	Cuti Alasan Penting		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
	e.	Cuti di Luar Tanggungan Negara		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
						kinerja Kelembagaan	
	f.	Dokumentasi Identitas Pegawai - Usul Penetapan Karpeg/KPE/Karis/Karsu - Berkas Pengusulan Satya lencana - Berkas Pengajuan BPJS	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
	g.	Kesejahteraan Pegawai	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
		- Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Peagawai	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
						Kelembagaan	
			- Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
			- Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
			- Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
			- Berkas tentang Layanan Olahraga dan Rekreasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
						mengganggu kinerja kelembagaan	
		<ul style="list-style-type: none"> - Berkas tentang Layanan Beras/Pakaian Dinas 		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
		<ul style="list-style-type: none"> - Berkas tentang Layanan Pengurusan Jenazah 		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
7.	SDM.07	Pemberhentian Sementara Pegawai		Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
					kelembagaan	
8.	SDM.08	Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Pensiun	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
9.	SDM.09	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
10.	SDM.10	Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/Janda/Dudanya&PNS yang Tewas	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
						unit	
11.	SDM.11	Berkas Perorangan Pegawai Negeri Sipil		Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
	a.	Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya		Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	b.	Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN		Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
						unit	
	c.	SK Pengangkatan CPNS		Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	d.	Hasil Pengujian Kesehatan		Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	e.	SK Pengangkatan PNS		Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
						unit	
	f.	SK Peninjauan Masa Kerja		Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	g.	SK Kenaikan Pangkat		Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	h.	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas / Menduduki Jabatan / Surat Pernyataan Pelantikan	Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
						unit	
	i.	SK Pengangkatan dalam atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional	Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit		
	j.	SK Perpindahan Wilayah Kerja	Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit		
	k.	SK Perpindahan Antar Instansi	Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
						unit	
	1.	SK Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)		Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	m.	Berita Acara Pemeriksaan		Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	n.	SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS		Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
						kelembagaan	
	o.	SK Perbantuan/Dipekerjakan di luar Instansi Induk	Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit		
	p.	SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/ Dipekerjakan	Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit		
	q.	SK Pemberian Uang Tunggu	Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
						unit	
	r.	SK Pembebasan dari Jabatan Organik		Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	s.	SK Pengalihan PNS		Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	t.	SK Pemberhentian sebagai PNS		Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
						kelembagaan	
	u.	SK Pemberhentian Sementara	Rahasia	Eselon II	mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan		
	v.	Surat Keterangan Pernyataan Hilang	Rahasia	Eselon II	mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan		
	w.	Surat Keterangan Kembalinya PNS yang dinyatakan Hilang	Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit		
	x.	SK Pengangkatan/Pemberhentian sebagai Pejabat Negara	Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
				Kewenangan	pelaksanaan tugas dan kinerja unit		
	y.	SK Penggantian Nama		Rahasia	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan	
	z.	Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran		Rahasia	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan	
	aa.	Akta Nikah/Cerai		Rahasia	Eselon II	Mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan	
	bb.	Akta Kelahiran		Rahasia	Eselon II	Mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
						kelembagaan	
	cc.	Isian Formulir PUPNS		Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan	
	dd.	Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan		Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	ee.	Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol		Terbatas		Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	ff.	Surat Keterangan Mutasi		Terbatas	Perorangan dan	Memiliki dampak	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
		Keluarga			Pejabat yang Diberi Kewenangan	yang dapat menganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	gg.	Surat Keterangan Meninggal Dunia		Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat menganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	hh.	Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan		Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat menganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	ii.	Penetapan Angka Kredit			Perorangan dan	Memiliki dampak	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
		Jabatan Fungsional			Pejabat yang Diberi Kewenangan	yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	jj.	Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus		Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	kk.	Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala		Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	ll.	Surat Tugas/Izin Belajar		Terbatas	Perorangan dan	Memiliki dampak	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
		Dalam/Luar Negeri			Pejabat yang Diberi Kewenangan	yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	mm.	Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri		Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	nn.	Kartu Pendaftaran Ulang (Kardaf) PNS		Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	oo.	Ijazah/Sertifikat		Rahasia	Perorangan dan	Menganggu	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
					Pejabat yang Diberi Kewenangan	pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan	
	pp.	SK Penempatan/Penarikan Pegawai		Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	qq.	SK Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk		Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	rr.	Surat Pertimbangan Status PNS		Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
					Kewenangan	pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	ss.	SK Pengaktifan Kembali sebagai PNS		Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	tt.	Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan		Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	uu.	Kenaikan Pangkat		Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
					Kewenangan	pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	vv.	Surat Pemberitahuan Kenaikan Grade	Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit		
	ww.	Hasil Ujian Dinas	Rahasia	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan		
	xx.	Pensiun	Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
						unit	
	yy.	Daftar hadir		Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	zz.	Formulir Isian Pegawai (FIK_SIK_01)		Rahasia	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan	
	Aaa.	Formulir Pemutakhiran Data Pegawai (FIK_SIK_01)		Rahasia	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan	
12	SDM.12	SELEKSI ANGGOTA KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
	-	Dokumen Perorangan Tim Seleksi	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan		
	-	Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Tim Seleksi	Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit		
	-	SK Penetapan Tim Seleksi	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
	-	Dokumen perorangan	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
		calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota				yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan	
	-	Keputusan-keputusan Tim Seleksi: i. Hasil Penelitian Administrasi ii. Hasil Tes Tertulis iii. Hasil Tes Psikologi iv. Hasil Tes Kesehatan v. Hasil Tes Wawancara vi. Penyampaian Nama Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU vii. Laporan Hasil Seleksi meliputi proses dan		Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
		hasil seleksi					
	-	Pengumuman-pengumuman oleh Tim Seleksi		Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
	-	SK Penetapan Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota		Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
13.	SDM.13	BERKAS PERSEORANGAN ANGGOTA KPU					BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Ketua dan Anggota KPU		Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
						tugas dan fungsi kelembagaan	
	-	Ketua dan Anggota KPU Provinsi		Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan	
	-	Ketua dan Anggota KPU		Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan	
14	SDM.14	PENGGANTIAN ANTAR WAKTU KETUA DAN ANGGOTA KPU, KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN KOTA					
	-	SK Pemberhentian Anggota		Biasa/Terbuka	Eselon IV atau	Tidak memiliki	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
		KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota			pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
	-	Dokumen perorangan calon PAW Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota		Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kelembagaan	
	-	Hasil verifikasi dan klarifikasi calon PAW Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota		Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan	
	-	SK Penetapan PAW Anggota KPU Provinsi dan		Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional	Tidak memiliki dampak yang	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
		KPU Kabupaten/Kota			yang setara dan/atau disetarakan	mengganggu kinerja kelembagaan	
	-	Dokumen Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas		Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
PERENCANAAN (PR)							
1.	KU.01	RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (RAPBN)					BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI
		A.	Penyusunan RAPBN	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
						tugas dan kinerja unit	
	1.	Arah Kebijakan Umum, Strategi, Prioritas, dan Renstra - Dokumen Renstra atas rencana kerja jangka panjang atas rencana kerja lima tahunan - Rencana Kerja Tahunan KPU	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit		
	2.	Dokumen Rencana Anggaran Kerja Instansi Pemerintah (RAKIP) dan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) KPU	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit		
	3.	Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
		Instansi Pemerintah (RASKIP)/Standar Biaya Khusus (SKB)				mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	4.	Ketetapan Pagu Definitif		Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	5.	Daftar Isian Pelaksnaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasioanl Kegiatan (POK) dan revisinya		Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	6.	Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pelaksanaan,		Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
		Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran				mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	7.	Ketetapan Pagu Indikatif/Pagu Sementara		Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	B.	Penyampaian RAPBN kepada DPR		Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	1.	Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Undang-		Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
		Undang RAPBN - Nota Keuangan Pemerintah - Materi RAPBN dari Lembaga Negara dan Badan Pemerintah (LNBP)				mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	2.	Pembahasan RAPBN oleh Komisi DPR		Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	3.	Risalah Rapat Dengar Pendapat DPR		Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
		4.	Nota jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
2.	KU.03	PELAKSANAAN ANGGARAN					BIRO KEUANGAN DAN BMN
		a.	Keputusan Ketua KPU ttg Penetapan <ul style="list-style-type: none"> - Kuasa Pengguna Anggaran/Barang - Keputusan Sekjen ttg Penetapan PPK, Pj SPM, PBJ Pusat - Keputusan Sekjen ttg Penetapan KPA/Barang 	Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenanga	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
		Sekretariat					
	b.	Pendapatan					
		1. Surat Setoran Pajak (SSP)	Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit		
		2. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)/ Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit		
		3. Penerimaan Sisa Anggaran Lebih dan Saldo Kas/Setoran Pengembalian Belanja (SSPB)	Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
						tugas dan kinerja unit	
		4. Penatausahaan BMN		Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	c.	Belanja					
		1. Surat Penyedia Dana SPP-UP/LS		Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
		2. Dokumen Belanja Pegawai - Daftar Gaji - Honor kehormatan		Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> - Tunjangan, uang makan - Uang lembur - Perjalanan dinas 		Kewenangan	pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
		3. Dokumen Belanja beserta data pendukungnya antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen uang muka dan data pendukung - Penagihan/invoice, kwitansi pembayaran, Faktur Barang/Pajak, Perjanjian, SPK BAP, Surat pernyataan - Berita Acara penyelesaian pekerjaan/serah terima barang - Surat Permintaan 	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pembayaran (SPP), ST, Undangan, Daftar Hadir, Keputusan				
		4. Laporan Pertanggungjawaban Anggaran yaitu: - Buku Kas Umum (BKU) - Buku Kas Pembantu (BKP) - Kartu Pengawas Kredit Anggaran	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
		5. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ), antara lain: - KPU - KPU Provinsi - KPU Kabupaten/Kota	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
		6.	Dokumen Keuangan - Berita Acara Pemeriksaan Kas - Kas/register penutupan Kas - Arsip Data Komputer - Berita Acara Rekonsiliasi Internal	Akuntasi Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
		7.	Verifikasi Anggaran - Nota Hasil Verifikasi - Jawaban Hasil Verifikasi	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
		8.	Laporan Keuangan Tahunan - Laporan Realisasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Anggaran (LRA) - Neraca - Catatan atas Laporan Keuangan - Laporan Pembukuan Equitas (LPE) - Laporan Operasional (LO)			kinerja kelembagaan	
		9. Sistem Akuntasi Instansi (SAI) - Manual implementasi Sistem Akuntasi Instansi - Kebijakan Akuntasi - Arsip Data Komputer dan BA Rekonsiliasi - Laporan Realisasi Semesteran APBN	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
3.	KU.04	BANTUAN/PINJAMAN LUAR NEGERI/HIBAH				BIRO

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
1	2	3		4	5	6	7	
								KEUANGAN DAN BMN
	a.	Pinjaman/Hibah Luar Negeri		Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit		
	1.	Permohonan Pinjaman Luar Negeri (<i>Blue Book</i>)		Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit		
	2.	Dokumen kesanggupan Negara donor (<i>Grey book</i>)		Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
						tugas dan kinerja unit	
	3.	Dokumen <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU), dan dokumen sejenisnya	Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit		
	4.	Dokumen loan Agreement Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN): <i>Draft agreement, legal opinion</i> , surat-menjurat dengan lender	Terbatas	Perorangan dan - Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit		
	5.	Alokasi dan Relokasi penggunaan dana luar negeri, a.l: usulan luncuran dana	Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
						tugas dan kinerja unit	
	6.	Aplikasi penarikan dana Bantuan Luar Negeri (BLN) berikut lampirannya:	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Reimbursement</i> - <i>Direct Payment/Transfer Procedure</i> - <i>Special Commitment/L/C Opening</i> - <i>Special Account/Imprest Fund</i> 	Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	7.	Otorisasi penarikan dana (<i>payment advice</i>)		Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
		8.	Realisasi pencairan dana bantuan luar negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SPM beserta lampirannya, a.l: SPP, Kontrak, BA dan data pendukung lainnya	Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
		9.	Replenishment (permintaan penarikan dana dari Negara donor) meliputi: <i>No Objection Letter (NOL)</i> , <i>Project Implementation</i> , <i>Notification of Contract</i> , <i>Withdraw Authorization (WA)</i> , <i>Statement of Expenditure (SE)</i>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
		10.	<i>Staff Appraisal Report</i>	Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
						pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	11.	<p><i>Report/laporan yang terdiri atas:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Progress Report</i> - <i>Monthly Report</i> - <i>Quarterly Report</i> 		Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	12.	<p>Laporan Hutang Negara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Pembayaran Hutang Negara - Laporan Posisi Hutang Negara 		Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	13.	<p><i>Completion Report/Annual Report</i></p>		Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
				Kewenangan	pelaksanaan tugas dan kinerja unit		
	14.	Ketentuan/peraturan yang menyangkut bantuan/pinjaman luar negeri	Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit		
	15.	Dana Hibah Dalam Negeri - Dokumen Usulan Anggaran - Naskah Perjanjian Hibah Daerah - RKA/RKB - Pakta Integritas - SPTJM - Persetujuan Nomor Register - Persetujuan Pembukaan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
			Rekening - Persetujuan Anggaran - Pengesahan Belanja <ul style="list-style-type: none"> • SP2HL • SPHL • SP4HL • SP3HL • Bukti Pengembalian Hibah Revisi Setoran				
4.	KU.06	PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA					BIRO KEUANGAN DAN BMN
		a.	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan oleh BPK	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
						kelembagaan	
	b.	Hasil Pengawasan dan Pelaksanaan Internal oleh Inspektorat	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan	INSPEKTORAT UTAMA	
	c.	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional: 1. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) 2. Memorandum Hasil Pengawasan (MHP) 3. Tindak lanjut/Tanggapan LHP	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan		
	d.	Dokumen Penyelesaian Kerugian Negara 1. Tuntutan Perbendaharaan	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
		2. Tuntutan Ganti Rugi				pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan	
KERUMAHTANGGAAN							
1.	RT.01	INVENTARISASI ASET					BIRO KEUANGAN DAN BMN
		1.	Administrasi Pengadaan Aset dan Persediaan meliputi naskah-naskah pengadaan secara lelang dan pengadaan secara langsung	Terbatas	Eselon IV/Pejabat Pengadaan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
		2.	Administrasi Pengelolaan Aset dan Persediaan Naskah-naskah Pengelolaan aset melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen	Terbatas	Eselon IV/Pejabat Pengadaan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Akutansi BMN, Pengelolaan aset tanah melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Tanah Pemerintah, dan Pengelolaan barang-barang habis pakai			unit	
	3.	Administrasi Penghapusan Aset dan Persediaan Naskah-naskah Penghapusan melalui prosedur lelang, pemusnahan, hibah dan penjualan habis pakai	Terbatas	Eselon IV/Pejabat Pengadaan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	4.	Administrasi Tuntutan Ganti rugi Naskah-naskah administrasi tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri Sipil dan ganti rugi terhadap pejabat-pejabat	Terbatas	Eselon IV/Pejabat Pengadaan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		lainnya				
2.	RT.02	PERJALANAN DINAS				BIRO UMUM
		Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
3.	RT.02	PENGURUSAN KENDARAAN DINAS				BIRO UMUM
		1. Pengurusan surat-surat kendaraan dinas	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
		2. Pemeliharaan dan Perbaikan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
						pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	3.	Peminjaman Kendaraan Dinas		Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	4.	Pengurusan Kehilangan dan masalah kendaraan		Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
4.	RT.03	PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN					BIRO UMUM
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perawatan meliputi		Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		pemeliharaan gedung, rumah dinas administrasi penggunaan/langganan peralatan telekomunikasi, jaringan listri, Air, telepon dan peralatan kantor lainnya			mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
5.	RT.09	KETERTIBAN DAN KEAMANAN				BIRO UMUM
		Meliputi Pengamanan, Penjagaan dan rumah dinas terhadap pejabat, kantor dan rumah dinas serta Laporan ketertiban dan keamanan meliputi naskah-naskah kehilangan, Kerusakan, kecelakaan dan gangguan.	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
PERSIDANGAN DAN KEPROTOKOLAN						
1.	PK.01	PERSIDANGAN				BIRO UMUM
		Meliputi naskah dinas berupa Undangan Rapat Pleno, risalah Rapat, Berita Acara Rapat Pleno, Transkip Rekaman Rapat, Rekaman Hasil Rapat (Audio)	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
					unit	
2.	PK.02	KEPROTOKOLAN				BIRO UMUM
		Meliputi naskah yang berkaitan dengan kegiatan Protokol dan Kunjungan Dinas dalam dan Luar Negeri dan Kunjungan dari Masyarakat.	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
KEARSIPAN DAN KETATAUSAHAAN						
1.	TU.01	ADMINISTRASI PERSURATAN				BIRO UMUM
		Naskah Dinas meliputi korespondensi Internal, Buku Angenda, Lembar Pengantar/ Buku Ekspedisi	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
2.	TU.02	PENGELOLAAN ARSIP				BIRO UMUM
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		kegiatan pengelolaan arsip aktif dan inaktif mulai dari penataan, penyimpanan, pemeliharaan, pemindahan, pemusnahan dan penyerahan arsip			dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
HUKUM (HK)						
1.	HK.01	Program Legislasi	Terbatas	Perseorangan dan pejabat yang diberi kewenangan	Memiliki dampak yang dapat menganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	BIRO PERUNDANG-UNDANGAN
2.	HK.02	Naskah Dinas yang berkenaan dengan penyusunan rancangan Peraturan KPU, meliputi pelaksanaan diskusi terarah (FGD), uji publik, permohonan konsultasi Peraturan KPU kepada DPR, proses harmonisasi, permohonan penetapan, dan pengundangan	Terbatas	Perseorangan dan pejabat yang diberi kewenangan	Memiliki dampak yang dapat menganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	BIRO PERUNDANG-UNDANGAN

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Peraturan KPU				
3.	HK.03	Meliputi Naskah Dinas yang berkaitan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, yang terkait dengan kegiatan Non Tahapan Pemilu dan Pemilihan				BIRO PERUNDANG-UNDANGAN
		HK.03.1 Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota	Biasa/terbuka	Perseorangan dan pejabat yang diberi kewenangan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
		HK.03.2 Keputusan Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota	Biasa/terbuka	Perseorangan dan pejabat yang diberi kewenangan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
					kelembagaan	
4.	HK.04	Dokumentasi dan Informasi Hukum, mencakup referensi hukum	Terbatas	Eselon IV/pejabat/pejabat fungsional dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	BIRO PERUNDANG-UNDANGAN
5.	HK.05	Penyuluhan/Pembinaan Hukum Berkas yang berhubungan dengan kegiatan penyuluhan dan pembinaan hukum	Terbatas	Eselon IV/pejabat/pejabat fungsional dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	BIRO PERUNDANG-UNDANGAN
6.	HK.07	Kajian Hukum dan Telaah Hukum Berkas yang berhubungan dengan kegiatan pengkajian dan penelaahan hukum	Terbatas	Eselon IV/pejabat/pejabat fungsional dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja	BIRO PERUNDANG-UNDANGAN

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
KEPUSTAKAAN (PUS)						
1.	PUS.03	Pembentukan Perpustakaan	Keanggotaan			BIRO PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
		Usulan dari Unit Kerja	Biasa/Terbuka	Perseorangan dan Pejabat yang diberi kewenangan	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
PUSAT PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
1.		Dokumen Proyek Perubahan	Biasa/Terbuka	Perseorangan dan Pejabat yang diberi kewenangan	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	Puslatlitbang

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
2.		Buku Penelitian	Biasa/Terbuka	Perseorangan dan Pejabat yang diberi kewenangan	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	Puslatlitbang
3.		Kajian/Jurnal/Riset	Biasa/Terbuka	Perseorangan dan Pejabat yang diberi kewenangan	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	Puslatlitbang
4.		Grand Design Puslatlitbang	Biasa/Terbuka	Perseorangan dan Pejabat yang diberi kewenangan	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	Puslatlitbang

B. DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FUNGSISUBSTANTIF DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD						
1.	PL.01.2	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden				PUSDATIN
	1.	Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dari Pemerintah kepada KPU	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
	2.	Daftar Pemilih Sementara (DPS)	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
	3.	Daftar Pemilih Sementara (DPS) hasil perbaikan awal	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat	Tidak memiliki dampak yang	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
					fungsional yang setara dan/atau disetarakan	mengganggu kinerja kelembagaan	
	4.	Daftar Pemilih Sementara (DPS) hasil perbaikan akhir		Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
	5.	Daftar Pemilih Tambahan		Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
	6.	Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)		Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
					disetarakan	kelembagaan	
	7.	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di kabupaten/kota	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	KPU Kabupaten/Kota	
	8.	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di provinsi	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	KPU Provinsi	
	9.	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara nasional	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	Pusdatin	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
		10.	Keputusan KPU tentang rekapitulasi jumlah pemilih secara nasional terinci untuk setiap kabupaten/kota dan provinsi	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota
		11.	Daftar Pendudukan Potensial Pemilih (DP4), Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT Luar Negeri	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
2.	PL.01.1	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden					BIRO TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
		1.	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik, meliputi:	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
		a.	Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3			4	5	6	7
				badan hukum		fungsional yang setara dan/atau disetarakan	kinerja kelembagaan	
		b.		Surat keterangan dari pimpinan partai politik	Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
		c.		Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik	Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
		d.		Bukti keanggotaan partai politik	Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
		e.		Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik	Terbatas	Eselon IV atau pejabat	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3			4	5	6	7
							fungsional yang setara dan/atau disetarakan	dan kinerja unit
			f.	Nama dan tanda gambar partai politik	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
			g.	Formulir dan surat pendaftaran partai politik	Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
			h.	Tanda bukti penerimaan dokumen pendaftaran	Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
			i.	Keputusan partai politik tentang kepengurusan	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3			4	5	6	7
							fungsional yang setara dan/atau disetarakan	kinerja kelembagaan
		j.	Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik			Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan
		k	Daftar Alamat Kantor Partai Politik tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota			Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan
		1	Rekapitulasi Kepengurusuan Partai Politik tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota			Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan
		m	Rekapitulasi Jumlah Keanggotaan Partai Politik di Kabupaten/Kota			Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3			4	5	6	7
						fungsional yang setara dan/atau disetarakan	kinerja kelembagaan	
	2.	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik, meliputi:			Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
		a.	Hasil verifikasi administrasi		Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
		b.	Hasil verifikasi faktual		Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
		c.	Surat dan berita acara hasil verifikasi administrasi		Terbatas	Eselon IV atau pejabat	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3			4	5	6	7
					fungsional yang setara dan/atau disetarakan	pelaksanaan tugas dan kinerja unit		
		d.	Surat dan berita acara hasil verifikasi faktual			Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit
		3.	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu Calon Perseorangan Anggota DPD, meliputi:			Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit
		a.	Dokumen syarat dukungan (KTP Pendukung)			Rahasia	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan
		b.	Dokumen persyaratan dukungan calon perseorangan			Terbatas	Eselon IV atau pejabat	Memiliki dampak yang dapat mengganggu

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3			4	5	6	7
					fungsional yang setara dan/atau disetarakan	pelaksanaan tugas dan kinerja unit		
	c.	Surat Pencalonan		Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit		
	d.	Dokumen persyaratan calon perseorangan		Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit		
	4.	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual Calon PerseoranganAnggota DPD, meliputi:						
	a.	Surat dan berita acara hasil verifikasi administrasi		Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3			4	5	6	7
		b.	Surat dan berita acara hasil verifikasi faktual	Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit		
		5	Penetapan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden					
		a	Keputusan KPU tentang penetapan partai politik sebagai peserta Pemilu	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
		b	Keputusan KPU tentang penetapan nomor urut dan tanda gambar partai politik sebagai peserta Pemilu	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
		c	Keputusan KPU tentang penetapan Calon Anggota DPD dalam Pemilu setiap provinsi seluruh Indonesia	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3			4	5	6	7
						setara dan/atau disetarakan	kelembagaan	
		6	Pencalonan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden					
3.	PL.01.1	Penetapan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden						BIRO TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
		1.	Keputusan KPU tentang penetapan partai politik sebagai peserta Pemilu		Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
		2.	Keputusan KPU tentang penetapan nomor urut dan tanda gambar partai politik sebagai peserta Pemilu		Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
		3.	Keputusan KPU tentang penetapan urutan nama peserta Calon Anggota DPD dalam Pemilu setiap provinsi seluruh Indonesia		Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
4.	PL.01.3	Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD						BIRO TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
		1.	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
		2.	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota DPRD Provinsi	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
		3.	Pedoman Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
		4.	Usulan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari KPU Kabupaten/Kota	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		5. Dokumen Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
		6. Hasil Rekapitulasi Usulan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari KPU Provinsi	Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
		7. Berita Acara terkait dengan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
		8. Surat-Surat terkait dengan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
		9.	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
		10.	Peta Daerah Pemilihan	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
5.	PL.01.4	Pencalonan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Serta Presiden dan Wakli Presiden					BIRO TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
		1.	Petunjuk teknis pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
		2.	Pengumuman terkait Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				fungsional yang setara dan/atau disetarakan	kinerja kelembagaan	
	3.	Petunjuk teknis pencalonan Anggota DPD	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
	4.	Pengumuman terkait Pencalonan Anggota DPD	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
	5.	Petunjuk teknis pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
	6.	Pengumuman terkait Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
					fungsional yang setara dan/atau disetarakan	kinerja kelembagaan	
	7.	Dokumen pendaftaran calon Anggota DPR dan DPRD, meliputi:					
		a.	Dokumen Pencalonan oleh Partai Politik	Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
		b.	Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon	Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	8	Dokumen pendaftaran calon Anggota DPD, meliputi:					
		a.	Dokumen Pencalonan	Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
				disetarakan			
	b.	Dokumen Persyaratan masing-masing calon		Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	9	Dokumen pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden, meliputi:					
	a.	Dokumen Pencalonan oleh Partai Politik		Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	b.	Dokumen Persyaratan masing-masing calon		Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	10.	Dokumen verifikasi administrasi Calon Anggota DPR dan DPRD, meliputi:					
	a.	Berita acara hasil verifikasi administrasi Calon Anggota DPR		Terbatas	Eselon IV atau	Memiliki dampak yang dapat	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3			4	5	6	7
				dan DPRD		pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
		b.	Surat Penyampaian hasil Berita Acara	Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit		
	11.	Berita acara hasil verifikasi administrasi Calon Anggota DPD						
		a.	Berita acara hasil verifikasi administrasi Calon Anggota DPD	Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit		
		b	Surat Penyampaian hasil Berita Acara	Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3			4	5	6	7
						disetarakan		
	12.	Berita acara hasil verifikasi administrasi Calon Presiden dan Wakil Presiden						
		a.	Berita acara hasil verifikasi administrasi Calon Presiden dan Wakil Presiden	Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit		
		b	Surat Penyampaian hasil Berita Acara	Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit		
	13.	Dokumen Daftar Calon Sementara Anggota DPR dan DPRD, meliputi						
		a.	Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara	Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit		
		b.	Daftar Calon Sementara Anggota DPR dan DPRD	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau	Tidak memiliki dampak yang		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3			4	5	6	7
					pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	mengganggu kinerja kelembagaan		
	c.	Persuratan terkait Daftar Calon Sementara		Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit		
	14	Dokumen Daftar Calon Sementara DPD, meliputi						
	a.	Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara		Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit		
	b.	Daftar Calon Sementara Anggota DPD		Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3			4	5	6	7
					disetarakan			
		c.	Persuratan terkait Daftar Calon Sementara			Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit
	15	Dokumen Daftar Pasangan Calon SementaraPresiden dan Wakil Presiden, meliputi						
		a.	Berita Acara Penetapan Daftar Pasangan Calon Sementara			Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit
		b.	Daftar Pasangan Calon Sementara			Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan
		c.	Persuratan terkait Daftar Calon Sementara			Terbatas	Eselon IV atau pejabat	Memiliki dampak yang dapat mengganggu

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3			4	5	6	7
						fungsional yang setara dan/atau disetarakan	pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	16	Dokumen Tanggapan Masyarakat		Rahasia	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan		
		a	Persuratan terkait tanggapan masyarakat	Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit		
		b	Berita Acara Hasil Verifikasi Pasca Tanggapan Masyarakat	Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit		
	17	Dokumen Daftar Calon Tetap Anggota DPR dan DPRD meliputi						

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3			4	5	6	7
		a.	Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap	Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit		
		b.	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
		c.	Persuratan terkait Daftar Calon tetap	Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit		
	18	Dokumen Daftar Calon Tetap Anggota DPD						
		a.	Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap	Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3			4	5	6	7
			b.	Daftar Calon Tetap Anggota DPD		disetarakan		
			c.	Persuratan terkait Daftar Calon Tetap	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
		19	Dokumen Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden meliputi			Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit
			a.	Berita Acara Penetapan Daftar Pasangan Calon	Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
			b.	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3			4	5	6	7
					fungsional yang setara dan/atau disetarakan	kelembagaan		
	c.	Persuratan terkait Daftar Pasangan Calon			Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	20	Dokumen Daftar Calon Tetap Hasil Perbaikan meliputi						
	a.	Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap Hasil Perbaikan			Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	b.	Daftar Calon Tetap Hasil Perbaikan			Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3			4	5	6	7
		c.	Persuratan terkait Daftar Calon Tetap Hasil Perbaikan	Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit		
6.	PL.01.6	Kampanye Pemilu						BIRO TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
		1.	Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye Pemilu	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
		2.	Dokumen Formulir Yang digunakan dalam kampanye Pemilu	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
		3.	Dokumen materi dan desain alat peraga kampanye dan iklan kampanye pemilu	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
					fungsional yang setara dan/atau disetarakan	kinerja kelembagaan	
	4.	Dokumen digital pelaksanaan debat Presiden dan Wakil Presiden	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
		Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota					BIRO TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
	1.	Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye Pemilihan	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
	2.	Dokumen Formulir Yang digunakan dalam kampanye Pemilihan	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
		3.	Dokumen materi dan desain alat peraga kampanye dan iklan kampanye pemilihan	Biasa/Terbuka	disetarakan Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
		4.	Dokumen digital pelaksanaan debat Pemilihan	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
7.	PL.01.7	Dana Kampanye Pemilu		Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	BIRO TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
		1	Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
					disetarakan		
	2	Keputusan KPU tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Dana Kampanye Pemilu		Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
	3	Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Penyerahan Sumbangan yang Tidak Sesuai Ketentuan ke Kas Negara		Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
	4	Laporan dana kampanye peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, dan DPRD		Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
		a	Data Penyumbang Dana Kampanye	Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3			4	5	6	7
		b	Rekening Koran		Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
		5	Tanda Terima Penerimaan Laporan Dana Kampanye peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD		Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
		6	Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Dana Kampanye peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Anggota DPR, DPD dan DPRD		Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
		7	Laporan hasil audit dana kampanye peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD		Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
		a	Kertas Kerja Pemeriksaan Laporan Dana kampanye peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD		Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3			4	5	6	7
					Kewenangan	dan kinerja unit		
	8	Tanda Terima Penerimaan Hasil Audit Dana Kampanye peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD			Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	9	Berita Acara Hasil Penerimaan Audit Laporan Dana Kampanye peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD			Terbatas	Perorangan dan Pejabat yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	10	Surat Edaran terkait pelaksanaan laporan dan Audit Dana Kampanye peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD			Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
8.	PL.01.8	Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD			Biasa/Terbuka			BIRO TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
		1.	Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara		Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
					setara dan/atau disetarakan	kelembagaan	
	2.	Master surat suara		Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kelembagaan	
	3.	Surat Suara		Terbatas	Perorangan dan Pejabat Yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	a.	Surat suara yang terpakai		Terbatas	Perseorangan dan Pejabat Yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	b.	Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)		Terbatas	Perseorangan dan Pejabat Yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	4	Berita Acara Serah Terima (BAST) Logistik Pemilu		Terbatas	Perseorangan dan Pejabat Yang	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	BIRO LOGISTIK

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
					Diberi Kewenangan	pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	5	Dokumen Pengadaan		Terbatas	ULP, PPK dan Pejabat Pengadaan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	BIRO LOGISTIK
	6	Dokumen Perencanaan Kebutuhan Logistik Pemilu		Terbatas	Satker dan Pejabat Yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	BIRO LOGISTIK
	7	Jenis formulir di TPS meliputi:					KPU Kabupaten/Kota
		a.	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
		b.	Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dan lampirannya	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3			4	5	6	7
					disetarakan			
		c.	Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi			Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan
		d.	Surat pernyataan pendamping pemilih			Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan
		e.	Surat pengantar penyampaian berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara			Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan
		f.	Tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara			Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
				disetarakan			
		g.	Surat keterangan pindah memilih	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
		h.	Daftar hadir pemilih di TPS	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
		i.	Formulir untuk mencatat nama-nama Pemilih yang memberikan suara menggunakan KTP, Paspor atau identitas lain	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
	8	Jenis formulir di PPS, meliputi:					KPU Kabupaten/Kota
		a.	Berita acara penerimaan hasil penghitungan suara	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
					setara dan/atau disetarakan	kelembagaan	
	b.	Surat pengantar penyampaian berita acara hasil rekapitulasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
	c.	Tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
	d.	Undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
	9.	Jenis formulir di PPK, meliputi:					KPU Kabupaten/Kota
	a.	Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3			4	5	6	7
					fungsional yang setara dan/atau disetarakan	kinerja kelembagaan		
		b.	Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dan lampirannya	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
		c.	Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
		d.	Berita acara penerimaan hasil penghitungan suara	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
		e.	Surat pengantar penyampaian berita acara hasil rekapitulasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3			4	5	6	7
					fungsional yang setara dan/atau disetarakan	kinerja kelembagaan		
		f.	Tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
		g.	Undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
	10.	Jenis formulir di KPU/KIP Kabupaten/Kota, meliputi:						KPU Kabupaten/Kota
		a.	Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
		b.	Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota dan lampirannya	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
		c.	Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
		d.	Berita acara penerimaan hasil penghitungan suara	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
		e.	Surat pengantar penyampaian berita acara hasil rekapitulasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
		f.	Tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
		g.	Undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
	11.	Jenis formulir di KPU Provinsi, meliputi:					
		a.	Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
		b.	Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi dan lampirannya	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3			4	5	6	7
					disetarakan			
		c.	Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi			Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan
		d.	Berita acara penerimaan hasil penghitungan suara			Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan
		e.	Surat pengantar penyampaian berita acara hasil rekapitulasi			Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan
		f.	Tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara			Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3			4	5	6	7
					disetarakan			
		g.	Undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara			Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan
	12.	Jenis formulir di KPU, meliputi:						
		a.	Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional			Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan
		b.	Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional dan lampirannya			Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan
		c.	Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi			Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3			4	5	6	7
						setara dan/atau disetarakan	kelembagaan	
	d.	Berita acara penerimaan hasil penghitungan suara		Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
	e.	Surat pengantar penyampaian berita acara hasil rekapitulasi		Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
	f.	Tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara		Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
	g.	Undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara		Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3			4	5	6	7
						setara dan/atau disetarakan	kelembagaan	
	13.	Surat-surat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai pemungutan dan penghitungan suara			Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
9.	PL.01.8	Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden						KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota
	1.	Keputusan KPU tentang penetapan dan pengumuman hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional			Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
	2.	Keputusan KPU tentang penetapan ambang batas suara sah partai politik peserta Pemilu Anggota DPR secara nasional			Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	Biro Teknis Penyelenggara Pemilu
	3.	Keputusan KPU tentang penetapan			Biasa/Terbuka	Eselon IV atau	Tidak memiliki	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		perolehan kursi peserta pemilu Anggota DPR		pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
	4.	Keputusan KPU tentang penetapan calon terpilih Anggota DPR	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
	5.	Keputusan KPU tentang penetapan calon terpilih Anggota DPD	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
	6.	Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota
10.	PY.01	Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil				BIRO ADVOKASI

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD, Gubernur, Walikota, serta Bupati				HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA
		1. Surat-surat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengenai Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD, Gubernur, Walikota, serta Bupati	Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
		2. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai pelapor/pengadu	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kelembagaan	
		3. Jawaban dan kesimpulan Termohon/Tergugat/Terlapor/Teradu/Pihak Terkait	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kelembagaan	
		4. Salinan Putusan lembaga peradilan	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Peradilan Pemilu: PN, PT, PTUN, PTTUN, MA, MK, DKPP, Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, KIP, BANI, Ombudsman		disetarakan		BIRO ADVOKASI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA
	1.	Surat-surat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai gugatan hukum maupun uji materiil	Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	2.	KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai pelapor/pengadu	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kelembagaan	
	3.	Jawaban dan kesimpulan Termohon/Tergugat/Terlapor/Teradu/Pihak Terkait	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kelembagaan	
	4.	Salinan Putusan lembaga peradilan	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
					fungsional yang setara dan/atau disetarakan	kinerja kelembagaan	
11.	PL.01.10	sumpah janji anggota DPR, DPD dan DPRD					Dihapus
	1.	Keputusan KPU tentang penetapan pimpinan sementara DPD RI		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
	2.	Keputusan KPU tentang penetapan pimpinan sementara DPR		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
	3.	Keputusan KPU tentang penetapan pimpinan sementara MPR		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
	4.	Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan pimpinan sementara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
11.	PR.04	Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD		Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	BIRO TEKNIS PENYELENGGARAAN

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				fungsional yang setara dan/atau disetarakan	kelembagaan	PEMILU
12.	PP.04	Pembentukan Badan Penyelenggara				BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
		- Pengumuman Seleksi	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
		- Dokumen perorangan calon anggota	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kelembagaan	
		- Hasil Seleksi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
		- Pengumuman Hasil Seleksi	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau	Tidak memiliki dampak yang	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	mengganggu kinerja kelembagaan		
	-	Berita Acara Penetapan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	-	Surat Keputusan Penetapan	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
	-	Dokumen Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan Pakta Integritas	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
		Penyelenggaraan Pemilu bagi WNI di luar negeri				BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI
	1.	Jenis Formulir di TPSLN meliputi:				
	a.	Berita acara pemungutan suara di TPSLN	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau	Tidak memiliki dampak yang	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3			4	5	6	7
					pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	mengganggu kinerja kelembagaan		
		b.	Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pemungutan suara di TPSLN	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
		c.	Surat pernyataan pendamping pemilih di TPSLN	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
		d.	Surat pengantar penyampaian berita acara pemungutan suara	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
		e.	Tanda terima penyampaian berita	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau	Tidak memiliki		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3			4	5	6	7
			acara pemungutan suara		pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
		f.	Daftar hadir pemilih di TPSLN	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
		g.	Formulir untuk mencatat nama-nama Pemilih yang memberikan suara menggunakan KTP, Paspor atau identitas lain	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
		h.	Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara TPSLN	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
		i.	Sertifikat hasil penghitungan	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau	Tidak memiliki		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3			4	5	6	7
			perolehan suara di TPSLN dan lampirannya		pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
		j.	Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam penghitungan suara di TPSLN	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
		k.	Surat pengantar penyampaian berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
		1.	Tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
		2.	Jenis formulir di PPLN, meliputi:					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
		a.	Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPLN	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
		b.	Sertifikat rekapitulasi penghitungan suara seluruh TPSLN, Pos dan Dropbox serta lampirannya	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
		c.	Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
		d.	Berita acara penerimaan hasil penghitungan suara	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
		e.	Surat pengantar penyampaian berita acara hasil rekapitulasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
		f.	Tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
		g.	Undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
		3.	Jenis formulir di KPU, meliputi:				
		a.	Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara luar negeri di KPU	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3			4	5	6	7
		b.	Sertifikat rekapitulasi penghitungan suara seluruh PPLN, serta lampirannya		disetarakan			
		c.	Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam rekapitulasi luar negeri	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
		d.	Berita acara penerimaan hasil rekapitulasi suara dari PPLN	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
		e.	Surat pengantar penyampaian berita acara hasil rekapitulasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3			4	5	6	7
			f.	Tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi perolehan suara	Biasa/Terbuka	disetarakan Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
			g.	Undangan rapat rekapitulasi perolehan suara pemilu luar negeri	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
		4.	Keputusan KPU tentang penetapan jadwal waktu pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri			Biasa/Terbuka Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
13.	PY.03	Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, dan DPRD						KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota
		1	Surat dari DPR, DPD dan DPRD terkait permintaan Pengganti Antar Waktu			Biasa/Terbuka Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
						kinerja kelembagaan	
	2	Berita Acara Verifikasi Penggantian Antar Waktu		Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kelembagaan	
	3	Surat jawaban KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota kepada DPR, DPD dan DPRD terkait Penganti Antar Waktu		Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kelembagaan	
	4	Keputusan Presiden/Menteri Dalam Negeri/Gubernur mengenai Pengganti Antar Waktu Anggota DPR, DPD dan DPRD		Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
	5	Berita Acara Verifikasi terhadap Tanggapan Masyarakat		Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kelembagaan	
II.	PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA						KPU PROVINSI/KAB/KOTA
	PL.02.1	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota				
	1.	Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dari Pemerintah Daerah kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat dilengkapi dengan DPT Pemilu terakhir berdasarkan Peraturan KPU Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 9 tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kelembagaan	
	2.	Daftar Pemilih Sementara (DPS)	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kelembagaan	
	3.	BA tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Rincian DPT	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
	4.	Daftar Pemilih Tambahan	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
						pelaksanaan tugas dan fungsi Kelembagaan	
	5.	Rekapitulasi jumlah Pemilih terdaftar di kabupaten/kota		Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
	6.	Rekapitulasi Jumlah Pemilih terdaftar di provinsi		Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
	PL.02.2	Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota					KPU PROVINSI/KAB/KOTA
	1.	Dokumen pendaftaran Pasangan Calon dari partai politik, meliputi:		Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	a.	Dokumen Syarat pencalonan		Terbatas	Eselon IV atau	Memiliki dampak	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
					pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	b.	Keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon		Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	c.	Keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota		Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
	d	Tanda Terima/Tanda Pengembalian		Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	d.	Dokumen persyaratan Pasangan					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3			4	5	6	7
				Calon				
				1	Dokumen Syarat calon	Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit
				2	Surat-surat pernyataan Pasangan Calon dan partai politik	Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit
				3	Susunan tim kampanye	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan
				4	Bukti nomor rekening khusus Pasangan Calon	Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3			4	5	6	7
					disetarakan			
		5	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon			Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan
		6	Surat-surat keterangan(SKCK, SPT, Keterangan Pailit, dsb)			Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit
		7	Daftar riwayat hidup Pasangan Calon			Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan
		8	Hasil Pemeriksaan Kesehatan			Rahasia	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kelembagaan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3			4	5	6	7
					disetarakan			
		9	Laporan Masyarakat		Rahasia	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kelembagaan	
		10	Hasil Klarifikasi Laporan Masyarakat		Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	PL.02.2	2.	Dokumen pendaftaran Pasangan Calon dari Perseorangan, meliputi:					KPU PROVINSI/KAB/KOTA
		a.	Dokumen persyaratan dukungan Pasangan Calon Perseorangan		Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
		b.	Surat pencalonan		Terbatas	Eselon IV atau pejabat	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3			4	5	6	7
					fungsional yang setara dan/atau disetarakan	pelaksanaan tugas dan kinerja unit		
		c.	Dokumen persyaratan Pasangan Calon Perseorangan	Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit		
			1) Surat pencalonan	Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit		
			2) Surat-surat pernyataan Pasangan Calon Perseorangan	Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit		
			3) Susunan tim kampanye	Terbatas	Eselon IV atau pejabat	Memiliki dampak yang dapat mengganggu		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
					fungsional yang setara dan/atau disetarakan	pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
			4) Bukti nomor rekening khusus Pasangan Calon Perseorangan	Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
			5) Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Perseorangan	Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
			6) Surat-surat keterangan	Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
			7) Daftar riwayat hidup Pasangan Calon Perseorangan	Terbatas	Eselon IV atau pejabat	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3			4	5	6	7
						fungsional yang setara dan/atau disetarakan	pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	PL.02.3	2	Dokumen hasil Penetilian Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan					
		a	Dokumen Syarat dukungan (KTP Pendukung)	Rahasia	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kelembagaan		
		b	Dokumen persyaratan dukungan calon perseorangan	Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit		
		c	Berita Acara hasil penelitian adminsitrasi dukungan Pasangan calon Perseorangan	Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3			4	5	6	7
		d	Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Dukungan Pasangan Calon Perseorangan		Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
		e	Berita Acara Rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan		Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
		3.	Dokumen hasil penelitian persyaratan pencalonan surat-surat dan berita acara hasil penelitian persyaratan pencalonan		Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	KPU PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA
		4.	Dokumen hasil penelitian persyaratan calon		Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
			Surat-surat dan berita acara hasil penelitian persyaratan calon	Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
		5.	Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
		6	Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
	PL.02.5	Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota					KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota
		1.	Keputusan KPU tentang Pembukaan dan penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta pemilihan Gubernur dan	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
			Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota		fungsional yang setara dan/atau disetarakan	kinerja kelembagaan	
		2.	Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pelaporan dana Kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsi nal yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
		3.	Keputusan KPU tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Dana Kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsi nal yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
		4	Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Penyerahan Sumbangan yang Tidak Sesuai Ketentuan ke Kas Negara oleh Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsi nal yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
		5	Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
			Wali Kota		fungsional yang setara dan/atau disetarakan	kinerja kelembagaan	
		a	Data Penyumbang Dana Kampanye	Terbatas	Perseorangan dan Pejabat Yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
		b	Rekening Korang	Terbatas	Perseorangan dan Pejabat Yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	6	Tanda Terima Penerimaan Laporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota		Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
	7	Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota		Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
				disetarakan			
	8	Laporan Hasil Audit Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota		Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
			Kertas Kerja Pemeriksaan Laporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Terbatas	Perseorangan dan Pejabat Yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	9	Tanda Terima Penerimaan Hasil Audit Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota		Terbatas	Perseorangan dan Pejabat Yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	10	Berita Acara Hasil Penerimaan Audit Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota		Terbatas	Perseorangan dan Pejabat Yang Diberi Kewenangan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	
	11	Surat Edaran terkait pelaksanaan Laporan dan Audit Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan		Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
			Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota		fungsional yang setara dan/atau disetarakan	kinerja kelembagaan	
			Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota				KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota
		1.	Keputusan KPU tentang Penetapan Jadwal kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
		2.	Nama juru kampanye/pelaksana kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
		3.	Peringatan tertulis/Penghentian kegiatan kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
		Pemungutan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota					KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota
		1.	Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
		a.	Master surat suara	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kelembagaan	
		b.	Surat Suara	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
			- Surat suara yang terpakai				
			- Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)				
	2.	Jenis formulir di TPS, meliputi:					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
		a.	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
		b.	Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
		c.	Rincian hasil penghitungan perolehan suara di TPS	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
		d.	Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3			4	5	6	7
		e.	Surat pernyataan pendamping pemilih	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
		f.	Surat pengantar penyampaian berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
		g.	Tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
		h.	Surat keterangan pindah memilih	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
		i.	Daftar hadir pemilih di TPS	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
		j.	Formulir untuk mencatat nama-nama Pemilih yang memberikan suara menggunakan KTP atau identitas lain	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
		3.	Jenis formulir di PPS				
		a.	Berita acara penerimaan hasil penghitungan suara	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
		b.	Surat pengantar penyampaian berita acara hasil rekapitulasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
				disetarakan			
	c.	Tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
	d.	Undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
	4.	Jenis formulir PPK					
	a.	Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
	b.	Sertifikat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dan lampirannya	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3			4	5	6	7
						setara dan/atau disetarakan	kelembagaan	
	c.	Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan			
	d.	Berita acara penerimaan hasil penghitungan suara	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan			
	e.	Surat pengantar penyampaian berita acara hasil rekapitulasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan			
	f.	Tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja			

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3			4	5	6	7
						setara dan/atau disetarakan	kelembagaan	
		g.	Undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara			Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan
	5.	Jenis formulir KPU/KIP Kabupaten/Kota, meliputi:						
		a.	Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota			Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan
		b.	Sertifikat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota dan lampirannya			Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan
		c.	Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi			Biasa/Terbuka	Eselon IV atau	Tidak memiliki dampak yang

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3			4	5	6	7
					pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	mengganggu kinerja kelembagaan		
		d.	Berita acara penerimaan hasil penghitungan suara	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
		e.	Surat pengantar penyampaian berita acara hasil rekapitulasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
		f.	Tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
		g.	Undangan rapat rekapitulasi hasil	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau	Tidak memiliki		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
		penghitungan perolehan suara			pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
	6.	Jenis formulir di KPU Provinsi, meliputi:					
		a.	Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
		b.	Sertifikat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi dan lampirannya	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	
		c.	Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3			4	5	6	7
		d.	Berita acara penerimaan hasil penghitungan suara	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
		e.	Surat pengantar penyampaian berita acara hasil rekapitulasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
		f.	Tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		
		g.	Undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara	Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
	PL.02.3	Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota		Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
	PL.01.9	Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan calon terpilih		Biasa/Terbuka	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kelembagaan	KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
	PY.02.1	Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota		Terbatas	Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
		1.	Surat-surat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan				
		2.	Jawaban dan kesimpulan termohon				
		3.	Salinan Putusan lembaga peradilan				
	PR.04	Laporan hasil penyelenggaraan Pemilihan		Terbatas	Eselon IV atau	Memiliki dampak	KPU PROVINSI/

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota		pejabat fungsional yang setara dan/atau disetarakan	yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja unit	KABUPATEN/KOTA

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM



Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah